



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kadek Anton Budiharta, A.Md.I.P., S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Heni Yuwono, Bc.I.P., S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Jawa Timur

Dr. Heni Yuwono, Bc.I.P., S.Sos., M.Si.
NIP. 196506051988111001



Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Madiun

Kadek Anton Budiharta, A.Md.I.P., S.H., M.Si.
NIP. 19670807008222000121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		4. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		5. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	90%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Dokumen
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 10.540.808.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 10.540.808.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.022.686.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 13.022.686.000,-

Surabaya, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Jawa Timur

Dr. Heni Yuwono, Bc.I.P., S.Sos., M.Si.
NIP/196506051988111001



Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas I Madiun

Kadek Anton Buchanta, A.Md.I.P., S.H., M.Si.
NIP/197908222000121001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kadek Anton Budiharta
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 5 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Madiun



Kadek Anton Budiharta, A.Md.I.P., S.H., M.Si.
NIP. 197908222000121001